

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online, kedua untuk menganalisis penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online khususnya dalam melindungi hak-hak korban. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang, sejarah, konseptual dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online masih belum memiliki pengaturan yang jelas. Pengaturan hak korban sangat penting diatur secara rinci dalam undang-undang. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus terhadap korban kejahatan tertentu, yaitu kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara adil terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berbasis gender online agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian dan penerapannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang muncul dari kekerasan berbasis gender di media sosial/online diperlukan adanya kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender yaitu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana agar dapat diperluas dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan berbasis gender online, Indonesia

## **ABSTRACT**

*This study aims, firstly to analyze the obstacles faced and the efforts made in providing legal protection to victims of online gender-based violence, secondly to analyze law enforcement against victims of online gender-based violence, especially in protecting the rights of victims. The type of research used is normative juridical law research which is prescriptive with legal, historical, conceptual and case approaches. The type of data used is secondary data. Legal protection for victims of online gender-based violence still does not have a clear regulation. The regulation of victims' rights is very important to be regulated in detail in the law. The Law on the Protection of Witnesses and Victims only regulates specifically for victims of certain crimes, namely victims of serious human rights violations, victims of criminal acts of terrorism, victims of criminal acts of trafficking in persons, victims of criminal acts of torture, victims of criminal acts of sexual violence, and victims of severe abuse. Therefore, it is necessary to revise the laws and regulations that have not regulated fairly on the legal protection of victims of online gender-based crimes so that there are no mistakes in their understanding and application. Efforts to prevent and overcome problems that arise from gender-based violence on social media/online require a penal and non-penal policy. The penal policy in overcoming gender-based violence is to reform the criminal law so that it can be expanded to fulfill legal protection for victims of online gender-based violence.*

*Keywords: Legal protection, victims, online gender-based violence, Indonesia.*